

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya.¹

Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Selain itu kesenjangan sosial semakin melebar akibat investasi yang dilakukan pemerintah (sebagai aktualisasi prinsip wirausaha dan semangat menghasilkan *output* efisien) lebih banyak digunakan untuk pembelian mesin-mesin produksi yang efisien sehingga justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja.²

Paradigma baru dibutuhkan untuk menjadikan semua *stakeholder* dalam pembangunan mempunyai peran yang seimbang guna mencapai tujuan utama pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Karena yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan,

¹ Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2009: 3.

² Todaro dalam Theresia, 2014: 18.

sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu. Goulet dalam Theresia mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yakni: a) tercapainya *swasembada* (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya; b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Pada akhirnya suatu paradigma baru lahir dengan menyajikan potensi-potensi baru guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian manusia itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai pembangunan berbasis rakyat (*people centered development*).³ Dengan berorientasi pada pembangunan berbasis rakyat, maka paradigma pembangunan di tingkat nasional, lokal, hingga komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial (kemitraan), dan prinsip *sustainability*.⁴ Paradigma ini sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam paradigma administrasi negara dari *government* ke *governance*. Paradigma *governance* (atau yang lebih populer disebut *good governance*) menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani (*civil society*).⁵

Menurut Laksana paradigma pembangunan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Lebih lanjut, menurut Laksana, *good governance* menekankan bahwa pemerintah harus mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang.⁶ Perubahan

³Korten dalam Theresia, 2014: 22., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*

⁴Nasdian, 2014: 23. *pengembangan masyarakat*

⁵santosa, 2009: 130. *teori dan aplikasi Good Governance*

⁶Laksana, Nuring Septiyasa. 2013: 56. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik: Volume 1, nomor 1*

paradigma di Indonesia secara signifikan mulai terlihat setelah terjadinya reformasi dimana Undang-Undang memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pembangunan yang optimal sesuai dengan potensinya. Perubahan ini mengubah paradigma pembangunan nasional secara signifikan dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan pembangunan masyarakat. Sebelum reformasi, pembangunan lebih menekankan masyarakat sebagai obyek yang dikenai pembangunan. Atau, dengan kata lain pembangunan bersifat sentralistik (*Top-down*). Sedangkan setelah reformasi, pembangunan melibatkan masyarakat sebagai subyek yang menentukan arah pembangunan, bukan lagi sebagai obyek (*bottom-up*).

Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai desa. Sehingga masyarakat desa sebagai ujung tombak pembangunan masih belum dapat berpartisipasi langsung (secara proaktif) terhadap penentuan arah pembangunan.⁷ Padahal, keberhasilan suatu wilayah menurut dapat dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Bila aspirasi masyarakat belum terakomodasi dengan baik dalam menentukan arah pembangunan desa, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat tersebut.

Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai desa. Sehingga masyarakat desa sebagai ujung tombak pembangunan masih belum dapat berpartisipasi langsung (secara proaktif) terhadap penentuan arah pembangunan. Padahal, keberhasilan suatu wilayah menurut Rosalina dapat dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Bila aspirasi masyarakat belum terakomodasi dengan baik dalam

⁷ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

menentukan arah pembangunan desa, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat tersebut.⁸

Penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah peran pemerintah dan masyarakat sudah seimbang dalam pembangunan khususnya di desa. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Nembo Ramba. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan (fisik) di Desa Nembo Ramba sudah terbilang cukup baik.

Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih. Sementara pembangunan non-fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Posyandu, adanya pengobatan gratis, adanya karnaval budaya, hingga masih terpeliharanya identitas lokal yakni kegotong royongan warga. Sedangkan dilihat dari intensitas pertemuan yang diadakan dapat diasumsikan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Nembo Ramba sudah cukup melibatkan masyarakat. Pertemuan yang ada di Desa Nembo Ramba dimulai dari tingkat RT sebulan sekali, kemudian tingkat RW dua bulan sekali, hingga tingkat Desa setahun dua kali. Namun, keseimbangan peran pemerintah-masyarakat tentu tidak bisa dilihat hanya dari intensitas pertemuan yang diadakan. Karena ada banyak faktor lain yang menentukan keseimbangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa meski pembangunan telah terlaksana cukup baik belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

⁸ Rosalina (2013: 107) *E-Journal Pemerintahan Integratif: Volume 1, Nomor 1*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: **“Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mendukung Pembangunan Desa Didesa Nembo Ramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Pada Latar Belakang Masalah Diatas, Maka Dapat Dirumuskan Masalah Pokok Dalam Penelitian Ini, Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam Mendukung Pembangunan Desa Didesa Nembo Ramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mendeskripsikan Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam Mendukung Pembangunan Desa Didesa Nembo Ramba Kecamatan Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

- ◆ Bagi Desa Nembo Ramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende, Semoga Penelitian Ini Memberikan Kontribusi Bagi Kelangsungan Kerja Dan Fungsi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat, Khususnya Pembangunan Desa Lokal Agar Dapat Ditingkatkan Lagi Kemudian Hari.
- ◆ Bagi Akademis, Semoga Peneliti Ini Bisa Memberikan Manfaat Bagi Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Sumber Informasi Serta Rujukan Bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Yang Membuat Laporan Sejenis.

- ◆ Diharapkan Dapat Dijadikan Sebagai Rujukan Dan Informasi Bsgi Penulis Atau Peneliti Lain Yang Sejenis Sehingga Berguna Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Khususnya Pada Bidang Ilmu Pemerintahan.